

PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERTUMBUHAN DAN PENGUATAN UMKM KABUPATEN PASURUAN

Hary Sastryawanto

sas_hary@yahoo.co.id

Dosen pada Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul Penyusunan Rencana Aksi Pertumbuhan dan Penguatan UMKM Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari penelitian ini adalah penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif dalam mendorong lahirnya wirausaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri dan tangguh. Mengidentifikasi kondisi eksisting terkait potensi (jenis dan skala usaha), peluang pengembangan produk dan pasar, permasalahan, faktor pendukung serta penghambat pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pasuruan. Menyusun tabel dan peta spasial. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja pemberdayaan UMKM Kabupaten Pasuruan selama 5 tahun terakhir. Menyusun visi, misi, sasaran dan arah pemberdayaan UMKM Kabupaten Pasuruan 2016-2021. Menyusun indikator, sasaran, arah kebijakan, strategi pemberdayaan UMKM Kabupaten Pasuruan 2016-2021. Menyusun model pemberdayaan yang mampu mendorong penumbuhan dan penguatan UMKM Kabupaten Pasuruan. Menyusun Rencana Aksi Penumbuhan dan Penguatan UMKM yang mampu mendukung pengembangan ekonomi lokal. Menyusun indikasi program dan kegiatan Rencana Aksi Penumbuhan dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2021.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisa deskriptif kualitatif dilakukan melalui proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, mengkategorikan, mengartikan, menginterpretasikan dan menafsirkan data dan informasi kualitatif dan kuantitatif yang tersedia. Proses ini berusaha mendeskripsikan, menggambarkan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat. Analisa deskripsi kuantitatif, dilakukan melalui analisa terhadap data yang berupa angka-angka dan laporan yang berupa data kuantitatif dengan bantuan analisa statistik, untuk menghitung kecenderungan (trend), grafik dan diagram maupun prosentase (%).

Hasil Penelitian ini memunculkan beberapa rekomendasi yaitu melembagakan program dan kegiatan pemberdayaan UMKM agar dapat diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam hal ini bukan hanya sekedar program inovasi pemerintah, namun membentuk sebuah UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) atau badan khusus yang memiliki fokus tugas membina dan mengembangkan UMKM. Menekankan pentingnya sebuah kualitas program pembinaan dan bersifat lintas sektoral sebagai proses pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan dengan

penganggaran tahun jamak (multi years budgeting) sehingga mengurangi kegagalan proses pemberdayaan. Menekankan pentingnya prinsip pemberdayaan UMKM berbasis komunitas atau kelompok usaha sehingga dampak sosial ekonominya lebih besar. Asas komunitas tersebut menyatakan bahwa guru atau mentor terbaik bagi pengusaha UMKM adalah para pengusaha juga. Karena hanya pengusaha yang sukses yang dapat memberdayakan pengusaha lainnya. Sehingga fungsi pemerintah daerah melalui SKPD terkait adalah fasilitator, koordinator dan katalisator dalam kegiatan pemberdayaan. Hal ini merupakan implementasi perilaku kemandirian dan tidak menciptakan ketergantungan bisnis UMKM dari bantuan pemerintah semata. Pemerintah dapat berinisiatif untuk memberikan apresiasi kepada para pelaku UMKM yang sukses dengan mengadakan acara tahunan penghargaan bagi UMKM terbaik dari seluruh Kabupaten Pasuruan, dengan harapan para penerima penghargaan tersebut dapat menjadi inspirasi dan model peran (role model) bagi pelaku usaha lainnya.

Kata kunci : UMKM, Pemberdayaan, Ekonomi Lokal.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, pada tahun 2014 menyatakan bahwa hanya sekitar 3 persen dari jumlah sebanyak 6,8 juta UMKM di Jatim yang siap menghadapi MEA. Dari jumlah itu hanya 3 persen yang siap hadapi MEA atau sekitar 240 ribu pengusaha kelas menengah yang telah memaasuki pasar ekspor. Sedangkan kelas pengusaha kecil sekitar 5 persen atau sebanyak 400 ribu pengusaha masih rintisan ekspor dan kita dorong untuk bisa bersaing. Salah satu uaya meningkatkan daya saing UMKM Jawa Timur adalah dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan memanfaatkan jejaring sosial online untuk memasarkan produknya

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, pada tahun 2015 telah mencapai 257.144 unit usaha. Trendnya meningkat dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan data jumlah pada tahun 2013, secara keseluruhan, jumlah UMKM meningkat sebanyak 6.990 unit usaha atau sebesar 2,79 persen. Peningkatan tersebut terbagi pada jumlah usaha mikro bertambah sebanyak 6.489 unit, usaha kecil bertambah sebanyak 419 unit, dan udaha menengah bertambah sebanyak 82 unit. UMKM tersebut bergerak di 9 sektor usaha dan tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Fakta tersebut cukup menggembirakan, karena menunjukkan banyaknya penduduk yang berwirausaha di Kabupaten Pasuruan. Hal itu menjadi indikator peluang dan potensi kemandirian ekonomi wilayah, sekaligus menjadi modal ketahanan perekonomian daerah dari pengaruh eksternal yang sangat cepat berubah. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, terus menerus berkomitmen, memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan melakukan berbagai upaya untuk menguatkan wirausahawan yang telah ada.

Meskipun terjadi pertumbuhan secara kuantitas, namun masih dijumpai banyak permasalahan dan tantangan dalam pengembangan UMKM di Kabupaten

Pasuruan. Selain permasalahan internal yang melekat pada UMKM, juga tantangan eksternal dengan telah berlakunya aturan di kawasan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Berlakunya aturan globalisasi tersebut telah menuntut UMKM Kabupaten Pasuruan untuk mampu bersaing dengan usaha-usaha serupa dari Negara-negara ASEAN yang akan memasuki Indonesia. Data mengenai perkembangan UMKM di Kabupaten Pasuruan, sejak pada tahun 2013-2015, menunjukkan peningkatan setiap tahun. sebagai berikut: Jumlah UMKM meningkat dari 248.801 unit pada tahun 2012 menjadi 257.144 unit pada tahun 2015, atau bertambah sebanyak 8.343 unit. Peningkatan selama 3 tahun tersebut sebesar 3,35% atau setara 1,12 % pertahun. Usaha yang paling besar pertambahan jumlahnya adalah usaha skala mikro.

Untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing UMKM Kabupaten Pasuruan tersebut diperlukan sebuah rencana aksi untuk menumbuhkan dan menguatkan keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pasuruan. Action plan tersebut merupakan sebuah dokumen perencanaan bagi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, yaitu mulai tahun 2016 hingga tahun 2021.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehinggampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'Tumbuh' memiliki pengertian 'sedang berkembang menjadi besar/sempurna', sehingga istilah penumbuhan bermakna sebagai 'proses, cara, perbuatan menumbuhkan'. Sedangkan penguatan, berasal dari kata dasar 'kuat' yang memiliki pengertian 'tahan, tidak mudah goyah oleh berbagai krisis serta memiliki kemampuan untuk menghadapi resiko yang diperhitungkan'. Sehingga istilah 'penguatan' bermakna sebagai 'proses, cara, perbuatan menguatkan atau menguatkan'.

UMKM perlu diberdayakan karena mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kokoh, mandiri, berkembang, seimbang dan berkeadilan. Program pemberdayaan UMKM harus diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan. Program tersebut dilaksanakan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, adanya pendampingan usaha, pemberian kesempatan berusaha, adanya dukungan dan perlindungan usaha, dan pengembangan usaha seluas-luasnya. Sehingga UMKM mampu meningkatkan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, sekaligus menjadi jalan bagi pembukaan lapangan kerja, yang berdampak pada pengentasan kemiskinan di masyarakat.

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Kabupaten Pasuruan, karena terbukti mampu bertahan dalam menghadapi krisis dan menjawab tuntutan pasar yang selalu berubah sesuai trend yang ada. Namun demikian, pemberdayaan UMKM bukan tanpa kendala. Di satu sisi, UMKM dituntut selalu kreatif, produktif

dan berinovasi dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang sangat cepat berubah. Di sisi yang lain, UMKM di Kabupaten Pasuruan masih menghadapi banyak permasalahan usaha, seperti ketersediaan bahan baku secara kontinyu, peningkatan biaya produksi dan potensi pesaing baru yang lebih murah dan lebih berkualitas sejak diberlakukannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sebagian besar UMKM di Kabupaten Pasuruan memiliki daya kreasi dan inovasi yang rendah, kualitas barang atau jasa yang belum konsisten dan produknya tidak spesifik atau unik karena mudah di produksi juga di daerah lain. Artinya daya saing UMKM tersebut masih relatif rendah, sehingga konsumen belum loyal terhadap produknya. Belum banyak, produk UMKM yang memiliki 'brand' yang cukup kuat dan mampu menarik pelanggan yang loyal. Secara mikro, produk UMKM memiliki elastisitas harga yang rendah, atau rentan terhadap perubahan atau kenaikan harga. Kenaikan harga produk UMKM seringkali menyebabkan konsumen mencari dan membeli produk serupa dengan harga yang lebih murah dari daerah lain. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan usaha tersebut di masa depan.

Pengusaha UMKM jumlahnya sangat banyak, bersifat unik dan berbeda satu dengan yang lainnya, maka model pemberdayaan yang baik bagi UMKM seharusnya bersifat personal dan spesifik pula. Selain itu pemberdayaan tersebut harus bersifat terpadu (integrated), tidak parsial dan berkelanjutan (sustainable). Serta berorientasi pada penyelesaian masalah (problem solving) dengan tepat, cepat, mudah dan murah.

Berbagai upaya pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pasuruan telah banyak dilakukan oleh pemerintah, melalui SKPD, perusahaan swasta melalui program CSR (corporate sosial responsibility), akademisi dari perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun oleh perorangan. Hal ini terbukti dengan telah didirikannya Klinik BIsnis bagi UMKM yang dikenal dengan konsep BDS (Business Development Service) sejak tahun 2013. Pada tahun 2016, telah diluncurkan pula program khusus untuk menghadapi persaingan MEA, yang diberi nama Satrya Emas (Pusat Strategi dan Pelayanan Ekonomi Maslahat). Konsep Satrya Emas merupakan pengembangan dari konsep BDS tersebut diatas.

Program ini didedikasikan untuk menumbuhkan dan menguatkan ekonomi bagi kemaslahatan masyarakat melalui UMKM. UMKM diharapkan dapat berubah mengikuti perubahan ekonomi global, khususnya menghadapi MEA. Program Satrya Emas dilengkapi dengan tenaga pendamping yang telah dilatih dan dipersiapkan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri.

Kenyataan tersebut sangat positif dan menggembirakan semua pihak. Namun demikian, berbagai upaya tersebut berjalan sendiri-sendiri, tidak terpadu dan tidak merata ke seluruh wilayah atau jenis usaha. Sehingga, beberapa unit UMKM mendapatkan pembinaan yang intensif dan menerima bantuan fasilitas untuk meningkatkan keterampilan, bantuan peralatan, kesempatan promosi dalam pameran hingga kemudahan dalam mengurus perijinan dan pendaftaran hak merek. Sementara masih banyak UMKM yang lain relatif belum tersentuh dan menerima bantuan atau fasilitas dari pemerintah.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menyusun sebuah dokumen perencanaan pemberdayaan UMKM yang komprehensif, agar program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dapat terarah dan efektif selama 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2016-2021. Oleh karena itu kegiatan tersebut dilakukan melalui Penyusunan Rencana Aksi Penumbuhan dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2021.

Permasalahan

Permasalahan yang mendasari kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penumbuhan dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Belum tersedianya Rencana Aksi Penumbuhan dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pasuruan yang mampu mendorong lahirnya wirausahawan yang tangguh dan mandiri.
2. Masih rendahnya daya saing dan kemandirian UMKM Kabupaten Pasuruan.
3. Belum terstandardisasinya manajemen, produk dan sumberdaya manusia UMKM Kabupaten Pasuruan.
4. Terbatasnya akses UMKM Kabupaten Pasuruan terhadap sumber permodalan dan lembaga pembiayaan.
5. Terbatasnya jangkauan pemasaran produk UMKM dan belum optimalnya jejaring bisnis (networking) UMKM Kabupaten Pasuruan.
6. Masih rendahnya penguasaan dan pemanfaatan iptek oleh UMKM dan berdampak pada belum efisiennya proses produksi barang/jasa yang dilakukan oleh UMKM Kabupaten Pasuruan.
7. Rendahnya daya inovatif dan kreatif UMKM dalam mengoptimalkan bahan baku lokal untuk menghasilkan produk berciri khas Kabupaten Pasuruan.
8. Masih rendahnya komitmen untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai permintaan pasar dan rendahnya kepedulian UMKM terhadap kelestarian lingkungan.
9. Belum optimalnya inovasi pengembangan pasar, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pemasaran produk UMKM.
10. Sebagian besar UMKM memiliki legalitas usaha (ijin usaha dan badan hukum).
11. Kegiatan pemberdayaan UMKM Kabupaten Pasuruan belum terintegrasi dan berkelanjutan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya Rencana Aksi Penumbuhan dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2021. Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif dalam mendorong lahirnya wirausaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri dan tangguh.
2. Mengidentifikasi kondisi eksisting terkait potensi (jenis dan skala usaha), peluang pengembangan produk dan pasar, permasalahan, faktor pendukung serta penghambat pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pasuruan.

*Penyusunan Rencana Aksi Pertumbuhan dan Penguatan UMKM Kabupaten Pasuruan,
Tahun 2016 (Hary Sastryawanto)*

3. Menyusun tabel dan peta spasial.
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja pemberdayaan UMKM Kabupaten Pasuruan selama 5 tahun terakhir.
5. Menyusun visi, misi, sasaran dan arah pemberdayaan UMKM Kabupaten Pasuruan 2016-2021.
6. Menyusun indikator, sasaran, arah kebijakan, strategi pemberdayaan UMKM Kabupaten Pasuruan 2016-2021.
7. Menyusun model pemberdayaan yang mampu mendorong penumbuhan dan penguatan UMKM Kabupaten Pasuruan.
8. Menyusun Rencana Aksi Penumbuhan dan Penguatan UMKM yang mampu mendukung pengembangan ekonomi lokal.
9. Menyusun indikasi program dan kegiatan Rencana Aksi Penumbuhan dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2021.

TINJAUAN TEORI

Pengertian UMKM

UMKM adalah kependekan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Batasan atau pengertian mengenai UMKM, telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Terdapat beberapa batasan mengenai UMKM dari berbagai ahli dan literatur. Namun demikian, pengertian yang digunakan dalam kajian ini adalah pengertian menurut Undang-Undang tersebut diatas, sebagai berikut:

Usaha Mikro

Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan. Kriteria sebagai Usaha Mikro, yaitu: a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil

Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria sebagai Usaha Kecil yaitu: a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar. Kriteria Usaha Menengah yaitu: a) memiliki kekayaan bersih lebih dari sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Teori Pemberdayaan UMKM

Secara filosofi, pemberdayaan selalu akan dihadapkan pada fenomena ketidakberdayaan sebagai titik tolak dari aktivitas pemberdayaan. Kieffer dalam Edi Suharto (1998) mendeskripsikan secara konkrit tentang kelompok mana saja yang mengalami ketidakberdayaan tersebut yaitu; “kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat seperti masyarakat kelas ekonomi rendah seperti kelompok miskin, usaha kecil, pedagang kaki lima, etnis minoritas, perempuan, buruh kerah biru, petani kecil, umumnya adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan”.

Model Pemberdayaan UMKM

Salah satu tujuan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penumbuhan Dan Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2021 adalah menyusun model pemberdayaan UMKM. Istilah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) digunakan, karena melalui UMKM pemerintah menempuh cara untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Artinya usaha mikro adalah identik dengan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. Usaha mikro sering disebut juga dengan usaha rumah tangga.

Strategi Pengembangan Produk dan Pasar

Pengembangan produk dan pasar bagi UMKM merupakan 2 hal kritis yang dapat menghambat pemberdayaan UMKM. Kedua hal tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan di pasar, baik domestik maupun global. Dengan adanya strategi pengembangan yang terintegrasi diharapkan UMKM menjadi kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi, tidak hanya memiliki keunggulan komparatif melainkan keunggulan kompetitif.

Standarisasi Produk dan Manajemen UMKM

Produk dan proses produksi sebagian besar UMKM di Indonesia belum memiliki sertifikasi standar, baik berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar internasional dari lembaga ISO (International Organization for Standardization). Banyak sekali manfaat yang diperoleh UMKM bila mampu mendapatkan standarisasi ISO. Beberapa manfaat tersebut, adalah:

1. Membantu peningkatan kualitas barang dan jasa. Standardisasi memberikan jaminan kepada pelanggan mengenai kualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM.
2. Membantu pertumbuhan, mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan bisnis. Standar ISO membantu UMKM memperoleh pasar baru untuk produk-produk yang dihasilkan. Sehingga memberikan pertumbuhan penjualan dan sekaligus meningkatkan keuntungan usaha. Umumnya, penerapan standar akan menambah biaya, akan tetapi hal ini akan segera terbayar oleh terciptanya produk-produk baru dan penerapan proses-proses baru yang sejalan dengan panduan standar.
3. Membuat UMKM memiliki keunggulan kompetitif. Bukan hanya mengandalkan keunggulan komparatif bahan baku, standardisasi akan meningkatkan daya saing UMKM sehingga memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif karena kualitas produk dan layanan UMKM pada gilirannya mampu menjaga hubungan baik dengan pelanggan, meningkatnya kepercayaan bisnis dan juga keuntungan.
4. Membuka pasar ekspor bagi produk UMKM. Standar ISO yang seragam dan harmonis membuat akses ke pasar ekspor lebih mudah, terutama bagi UMKM, karena mengurangi biaya dan waktu. Lebih dari itu, standardisasi akan meningkatkan kepopuleran merek karena pelanggan mendapat jaminan kualitas.
5. Mendapatkan pelanggan baru dan memperkuat bisnis. Standar ISO memberikan pondasi yang kuat bagi bisnis UMKM yang ingin memperluas basis pelanggannya. Dengan penerapan sistem manajemen mutu ISO, maka proses-proses produksi diperbaiki dan menurunkan biaya yang diakibatkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak efisien. Hal tersebut mendatangkan peluang bisnis yang tidak mungkin terjadi seandainya tidak menerapkan sistem manajemen mutu yang terverifikasi.
6. Membantu UMKM berkompetisi dengan produk perusahaan lain. Kemampuan peningkatan kapasitas produksi harus dimiliki jika bersaing dengan perusahaan besar dan standar ISO memberikan jalan bagi UMKM proses untuk melakukan hal tersebut. ISO adalah perangkat yang paling tepat untuk mengelola pelipatgandaan kapasitas (scalability) dalam rantai pasok, membantu UMKM meningkatkan produktivitas dan keunggulan.
7. Meningkatkan kredibilitas dan menjaga kepercayaan pelanggan. Sebagai produsen yang berbasis pengetahuan, UMKM bisa menjaga kepercayaan pelanggan melalui kreativitas dan inovasi produk dan layanan terus menerus.
8. Meningkatkan efisiensi usaha. Sertifikasi ISO akan meningkatkan efisiensi usaha karena proses tersebut melibatkan mitra, pemasok dan pelanggan dalam tujuan yang sama. Proses bisnis bias diintegrasikan sejak hulu hingga hilir.
9. Memperkuat kemampuan pemasaran UMKM. Penggunaan berbagai macam standar domestik dan internasional, akan membuka jaringan pemasaran lebih luas. Standardisasi akan membantu mempertemukan antara kebutuhan pelanggan dan pemerintah, mendukung pendekatan dan strategi pemasaran UMKM.

Membantu UMKM dalam mematuhi peraturan/perundangan yang ditetapkan pemerintah. Standar ISO tidak hanya membantu anda dalam mematuhi peraturan

pemerintah, mengenai kelestarian lingkungan misalnya, tetapi juga menunjukkan kepada calon pelanggan potensial bahwa kita bekerja sesuai peraturan dalam menyediakan produk dan jasa berkualitas.

METODE PENELITIAN

Metode Penentuan Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penumbuhan Dan Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2021 adalah di seluruh wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Lokasi kegiatan difokuskan pada satuan wilayah kecamatan, yaitu pada 24 kecamatan.

Metode Penentuan Sampel Responden

Jumlah UMKM di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2015, merupakan angka yang mewakili populasi pengusaha yang menjadi sasaran/target kegiatan ini. Mengingat keterbatasan waktu dan sumberdaya, maka survey lapangan hanya dilakukan dengan contoh/sampel. Teknik pengambilan contoh responden (sampling technic) adalah dipilih secara acak berstratifikasi (stratified random sampling). Strata sampel adalah jenis dan skala usaha. Skala usaha terbagi tiga menjadi 3 strata yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Strata jenis usaha berdasarkan klasifikasi jenis usaha yaitu 9 klasifikasi berdasarkan data BPS, yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, gas, listrik dan air, konstruksi, transportasi, jasa

Pengambilan sampel responden sebanyak 5 orang pengusaha perwakilan dari setiap strata di setiap kecamatan. Sehingga jumlah responden secara keseluruhan sebanyak 360 orang responden pengusaha UMKM. Pemilihan responden didasarkan pada database UMKM yang tersedia di satuan kerja pemerintah daerah terkait yaitu Dinas Koperasi UKM.

Selain itu, untuk menggali data lebih dalam, informan kunci (key informan) yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) pihak Pemerintah Daerah, melalui SKPD yang terkait dengan UMKM; (2) pengusaha pemerhati masalah UMKM; (3) pihak-pihak non pemerintah yang terlibat dalam pemberdayaan UMKM yang relevan dengan pengumpulan data kegiatan ini. Penentuan sampel responden terbatas ini adalah Purposive Sample, yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan cara menunjuk orang-orang yang dianggap mampu memberikan kebutuhan data yang diperlukan.

Metode Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam analisis ini berupa data primer dan sekunder yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data primer diperoleh melalui metode wawancara terstruktur menggunakan kuesioner, dan wawancara tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dari responden. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan instansi. Data sekunder tersebut berupa catatan, laporan, makalah dalam bentuk dokumen maupun data yang terdapat di kantor SKPD dan

dipublikasikan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Data yang dikumpulkan adalah data runtut waktu selama 5 tahun terakhir (2011-2015).

Selain itu dilakukan diskusi kelompok terfokus (Focus Discussion Group/FGD) dengan stakeholder yang terkait dan memiliki program dan kegiatan pengembangan UMKM di Kabupaten Pasuruan.

Metode Analisa Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan ini adalah Analisa Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif. Analisa deskriptif kualitatif dilakukan melalui proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, mengkategorikan, mengartikan, menginterpretasikan dan menafsirkan data dan informasi kualitatif dan kuantitatif yang tersedia. Proses ini berusaha mendeskripsikan, menggambarkan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat. Analisa deskripsi kuantitatif, dilakukan melalui analisa terhadap data yang berupa angka-angka dan laporan yang berupa data kuantitatif dengan bantuan analisa statistik, untuk menghitung kecenderungan (trend), grafik dan diagram maupun prosentase(%).

Kerangka Berpikir

Permasalahan utama yang menghambat kemajuan UMKM di Kabupaten Pasuruan adalah masih rendahnya tingkat kemandirian dan daya saing. Penyebab rendahnya kemandirian dan daya saing tersebut sangat beragam dan kompleks. Penyebab tersebut juga berbeda-beda di antara 9 sektor UMKM dan berbagai skala usaha.

Guna memecahkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan perencanaan pemberdayaan UMKM berdasarkan potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Langkah pertama dalam kajian ini adalah mendeskripsikan kondisi eksisting UMKM di Kabupaten Pasuruan, dan melihat trend perkembangannya selama 5 tahun terakhir yaitu dalam periode 2011-2015. Langkah kedua, adalah melakukan evaluasi dari berbagai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan khususnya yang terkait dengan pengembangan UMKM. Program tersebut dilakukan secara lintas sektoral, yang melibatkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian sedangkan Dinas Koperasi UKM itu sendiri sebagai leading sector (sektor penghela).

Berdasarkan gambaran mengenai kondisi eksisting UMKM dan program pembangunan yang telah dilakukan, maka dilakukan langkah ketiga, yaitu melakukan identifikasi gambaran karakteristik UMKM menurut jenis dan skala usaha dengan menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki dan dialami oleh UMKM. Analisanya menggunakan SWOT secara kuantitatif. Gambaran mengenai

karakteristik tersebut akan menentukan berbagai strategi yang dapat direkomendasikan dalam penumbuhan dan penguatan UMKM.

Langkah ke-empat adalah menggambarkan kondisi dan kemampuan UMKM dalam menghadapi persaingan bisnis, menanggapi perubahan permintaan pasar terutama terkait dengan berlakunya aturan MEA sejak tahun 2015. Sehingga UMKM di Kabupaten Pasuruan tidak hanya memiliki keunggulan komparatif, namun juga mampu membangun keunggulan kompetitif di pasar nasional dan pasar ekspor. Analisa yang digunakan adalah analisa model Diamond Cluster.

Langkah pertama hingga ke empat merupakan analisa mengenai UMKM secara mikro, yaitu menggambarkan keadaan UMKM tersebut dan berbagai peluang yang dapat dikembangkan untuk setiap jenis dan skala usahanya.

Langkah kelima, merupakan analisa posisi UMKM secara makro, terkait kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ekonomi yang telah dilakukan. Yaitu menggambarkan persebaran UMKM di Kabupaten Pasuruan melalui sarana pemetaan spasial GIS dan pemberdayaan UMKM berdasarkan kawasan. Untuk itu dilakukan analisa spesialisasi daerah. Diharapkan, pemetaan dan analisa spesialisasi tersebut mampu merumuskan prioritas pemberdayaan UMKM berdasarkan jenis usaha, skala usaha dan lokasinya.

Rangkuman dari kelima langkah tersebut, dijadikan acuan dalam menyusun rekomendasi mengenai Visi, Misi, Arah Kebijakan serta Rencana Aksi Penumbuhan dan Penguatan UMKM Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2021.

Berdasarkan hasil analisis dan perencanaan penumbuhan dan penguatan UMKM di Kabupaten Pasuruan dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

UMKM Kabupaten Pasuruan sebagian besar adalah usaha berskala mikro, hanya sebagian kecil yang berskala kecil dan menengah. Oleh karena itu fokus dan prioritas pemberdayaan UMKM harus diberikan lebih besar bagi penumbuhan dan penguatan usaha mikro.

Secara umum pemberdayaan UMKM Kabupaten Pasuruan terdiri dari 3 pokok permasalahan yaitu peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan bisnis (*capacity building*), peningkatan kualitas kewirausahaan melalui pembentukan karakter utama pengusaha yaitu mandiri, tangguh, kreatif dan inovatif (*character building*), peningkatan daya saing UMKM melalui pemahaman kebutuhan pasar dan peningkatan kualitas produk (*competitiveness building*).

Pemberdayaan merupakan sebuah proses kegiatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan UMKM (*stakeholders*) secara terpadu, yaitu pemerinah daerah sebagai pengambil kebijakan, lembaga penelitian dan pendidikan sebagai agen informasi dan perubahan, lembaga keuangan sebagai katalisator percepatan bisnis, dan perusahaan besar sebagai pemimpin pasar.

Proses pemberdayaan harus merupakan sebuah siklus dan bukan kegiatan insidental sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan indikator keberhasilan yang terukur baik kuantitas maupun kualitasnya.

UMKM subsektor pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan memiliki daya saing tinggi karena basis sumberdaya bahan baku yang melimpah.

UMKM subsektor industri dan perdagangan memiliki daya saing tinggi karena basis keterampilan dan kreatifitas sumberdaya manusia dalam mendisain dan menghasilkan produk yang diterima pasar.

UMKM subsektor lain yaitu keuangan, transportasi dan jasa-jasa memiliki daya saing rendah karena belum berkembang mengikuti dinamika pasar.

Produk-produk UMKM yang dapat diunggulkan dan diprioritaskan dalam pengembangan antara lain: bordir, konveksi/garmen, mebel dan kerajinan kayu, olahan hasil perkebunan dan olahan hasil laut dan perikanan.

Produk-produk UMKM yang berpotensi menjadi unggulan dan masih memerlukan pemberdayaan yang optimal antara lain: berbagai produk makanan dan minuman, batik khas Kabupaten Pasuruan, olahan hasil peternakan, dan olahan hasil pertanian.

Permasalahan dan hambatan utama bagi UMKM Kabupaten Pasuruan yang harus diatasi agar lebih maju adalah kelemahan dalam pemasaran karena terbatasnya informasi pasar dan kurangnya kualitas produk; belum ada upaya standarisasi produk, baik SNI (Standar Nasional Indonesia), standar kesehatan BPOM dan label halal dari MUI untuk makanan dan minuman; kelemahan dalam akses lembaga keuangan karena sebagian besar UMKM tidak layak mendapatkan pinjaman komersial karena tidak memiliki agunan yang bersertifikat; kelemahan dalam kapabilitas dan karakter kewirausahaan yang dimiliki oleh sumberdaya manusia UMKM; sebagian besar UMKM masih belum memahami manfaat dan pentingnya aspek legalitas usaha, baik tentang perijinan usaha maupun bentuk perusahaannya. Lokasi UMKM Kabupaten Pasuruan tersebar di seluruh Kecamatan. Sebaran data selengkapnya disajikan dalam bentuk tabel dan peta pada lampiran.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir telah melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan UMKM. Hasil yang dicapai cukup berhasil. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja urusan UMKM serta mulai dikenalnya produk unggulan Kabupaten Pasuruan oleh khalayak. Namun masih banyak hal yang masih perlu dilakukan agar pemberdayaan UMKM lebih tepat sasaran yaitu tumbuhnya wirausaha baru dan penguatan yang sudah ada. Visi Pemberdayaan UMKM Kabupaten Pasuruan adalah “Terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi dalam Mendukung Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan”.

Visi sebagaimana tersebut diatas akan diwujudkan melalui misi sebagai berikut: Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi bagi sumberdaya manusia UMKM (Capacity building); Menumbuhkembangkan karakter pelaku UMKM yang mandiri, tangguh, kreatif, dan inovatif dalam berusaha; Mengembangkan usaha ekonomi yang berbasis potensi daerah dan sumberdaya lokal dan berbasis potensi pasar; Membangun iklim usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM; Memberdayakan UMKM melalui program-program pemerintah daerah; Mengembangkan pola kemitraan UMKM dan perusahaan besar yang saling

menguntungkan; Meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal, regional, nasional dan internasional melalui model pemberdayaan yang aplikatif, terpadu, dan berkelanjutan. Arah kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM sebagai berikut: Meningkatkan kapasitas SDM dan kompetensi pelaku UMKM; Memudahkan perijinan usaha terutama yang berbasis potensi daerah dan pemanfaatan sumberdaya lokal; Mengembangkan sentra-sentra produksi dan sentra pemasaran sebagai upaya meningkatkan promosi dan transaksi perdagangan UMKM; Memudahkan UMKM dalam mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan dengan bunga yang murah; Mendorong peningkatan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; Meningkatkan keterpaduan lintas sektoral dalam mengembangkan UMKM seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal oleh UMKM sebagai upaya mengurangi pengangguran dan tingkat kemiskinan. Model pemberdayaan bagi UMKM Kabupaten Pasuruan yang terbaik adalah yang mengutamakan prakarsa atau inisiatif dari pelaku usahanya, menekankan pada prinsip kemandirian usaha dan mengutamakan pola kemitraan bisnis dengan perusahaan yang lebih besar. Rencana Aksi Penumbuhan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah merumuskan 20 Program dan 27 Kegiatan.

Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka dapat disusun sebuah rekomendasi sebagai berikut: Melembagakan program dan kegiatan pemberdayaan UMKM agar dapat diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam hal ini bukan hanya sekedar program inovasi pemerintah, namun membentuk sebuah UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) atau badan khusus yang memiliki fokus tugas membina dan mengembangkan UMKM. Menekankan pentingnya sebuah kualitas program pembinaan dan bersifat lintas sektoral sebagai proses pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan dengan penganggaran tahun jamak (multi years budgeting) sehingga mengurangi kegagalan proses pemberdayaan. Menekankan pentingnya prinsip pemberdayaan UMKM berasas komunitas atau kelompok usaha sehingga dampak sosial ekonominya lebih besar. Asas komunitas tersebut menyatakan bahwa guru atau mentor terbaik bagi pengusaha UMKM adalah para pengusaha juga. Karena hanya pengusaha yang sukses yang dapat memberdayakan pengusaha lainnya. Sehingga fungsi pemerintah daerah melalui SKPD terkait adalah fasilitator, koordinator dan katalisator dalam kegiatan pemberdayaan. Hal ini merupakan implementasi perilaku kemandirian dan tidak menciptakan ketergantungan bisnis UMKM dari bantuan pemerintah semata. Pemerintah dapat berinisiatif untuk memberikan apresiasi kepada para pelaku UMKM yang sukses dengan mengadakan acara tahunan penghargaan bagi UMKM terbaik dari seluruh Kabupaten Pasuruan, dengan harapan para penerima penghargaan tersebut dapat menjadi inspirasi dan model peran (role model) bagi pelaku usaha lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- , Kabupaten Pasuruan Dalam Angka, 2015. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Pasuruan.
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- , 2010. Renstra (Rencana Strategis) Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2010 – 2014, Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta.
- Arief Rahmana, 2012. Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Sektor Industri Pengolahan. Universitas Widyatama. Jurnal Teknik Industri, Vol. 13, No. 1, Februari 2012.
- Eddy Cahyono S. 2013. Prospek Ekonomi Indonesia 2014, Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Jakarta.
- Jamin Yasa, I Made, 2010. Melalui Kemitraan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Dapat Berkembang dengan Baik, Jurnal Ilmiah SARATHI, Vol 31, Universitas Warmadewa.
- , 2013, Merancang Strategi Pemasaran Bagi Para Pedagang, Buletin Visi Economica Edisi 34, Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa.
- Linda, 2012. Analisis Dampak Kredit Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Semarang. Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Porter, 1990. Keunggulan Bersaing: Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Priyono, Edy, 2004. Usaha Kecil Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi : Berkaca Dari Pengalaman Taiwan, dalam Jurnal Analisis Sosial Volume 9 No. 2 Agustus 2004.
- Sudaryanto, dkk. 2012. Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Tambunan, T., 2005. Promoting Small and Medium Enterprises with a Clustering Approach: A Policy Experience from Indonesia, Journal of Small Business Management, Vol 43 No. 2, pp. 138–154.

*Penyusunan Rencana Aksi Pertumbuhan dan Penguatan UMKM Kabupaten Pasuruan,
Tahun 2016 (Hary Sastryawanto)*

Website :Sertifikat ISO 9000. Sumber : <http://portalukm.com/siklus-usaha/membangun-usaha/sertifikat-iso-9000/> diakses 5 Mei 2016.